

**POTENSI KONFLIK POLITIK PADA PEMILU LEGISLATIF
2009 DI KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA
SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan meraih
Gelara Strata Satu (S-1) Dalam Bidang
Ilmu Sosiologi**



Oleh:

**SRI JUNIARTI
07053102041**

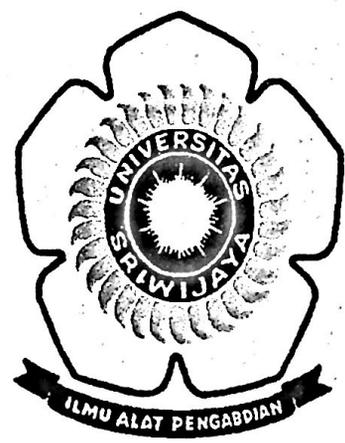
**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2010

S
172.07
2010
P. W. W. S.
2010

**POTENSI KONFLIK POLITIK PADA PEMILU LEGISLATIF
2009 DI KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA
SELATAN**

SKRIPSI
Untuk Memenuhi Persyaratan meraih
Gelar Strata Satu (S-1) Dalam Bidang
Ilmu Sosiologi



Oleh:
SRI JUNIARTI
07053102041

JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS IMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2010

**POTENSI KONFLIK POLITIK PADA PEMILU LEGISLATIF
2009 DI KABUPATEN OGAN ILIR**



SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN
DALAM MENCAPAI DERAJAT ILMU SOSIAL**

**DIAJUKAN OLEH:
SRI JUNIARTI
(07053102041)**

**TELAH DISETUJUI OLEH DOSEN PEMBIMBING
INDERALAYA, DESEMBER 2009**

DOSEN PEMBIMBING I

**Dra.Dyah Hapsari .ENH, M.Si
NIP. 196010021992032001**

DOSEN PEMBIMBING II

**Diana Dewi Sartika S.Sos.M.Si
NIP. 198002112003122003**

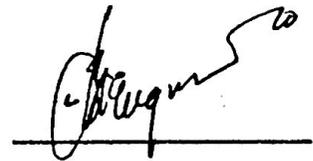
**POTENSI KONFLIK POLITIK PADA PEMILU LEGISLATIF
2009 DI KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA
SELATAN**

SKRIPSI

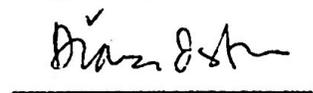
**Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
dan Dinyatakan Berhasil Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
dari Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi
Pada Tanggal, 1 Februari 2010**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

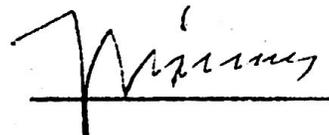
Dra. Dyah Hapsari, ENH, M.Si
Ketua



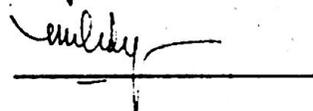
Diana Dewi Sartika, S.Sos, M.Si
Anggota



DR. Zulfikri Suleman, MA
Anggota



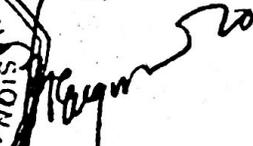
Dra. Hj. Eva Lidya, M.Si
Anggota



**Indralaya, Februari 2010
Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



Dekan,



Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si
NIP. 196010021992032001

M. Djalila
1990

*Kesempatan yang kecil
seringkali merupakan permulaan
daripada usaha yang besar.*

*Kehidupan ini
dipenuhi dengan seribu macam
kemanisan tetapi mencapainya
perlu pengorbanan.*

Kupersembahkan Kepada:

- 1. Orang Tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a tanpa henti*
- 2. Ngaliku tersayang yang selalu memberiku banyak dukungan*
- 3. Saudara-saudaraku*
- 4. Sahabatku*
- 5. Dosen FISIP UNSRI Jurusan Sosiologi*
- 6. Almamaterku.*

KATA PENGANTAR

Skripsi yang berjudul “Potensi Konflik Politik Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 Di Kabupaten Ogan Ilir” secara spesifik mengkaji faktor-faktor yang merupakan potensi konflik pemilu legislatif 2009 di Kabupaten Ogan Ilir.

Tak dapat dipungkiri bahwa selesainya naskah skripsi ini tentunya tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak yang telah memberikan sumbangsih baik moril maupun materil kepada penulis, untuk itu penulis memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT beserta rasul-Nya atas semua limpahan dan curahan nikmat serta kasih sayang, kekuatan, dan perlindungan kepada penulis, dan untuk itu pula secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Dra. Dyah Hapsari, ENH, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasihat, saran dan pengarahan serta pandangan-pandangan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak DR. Zulfikri Suleman, MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosiologi FISIP Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Diana Dewi Sartika S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan saran yang sangat bermanfaat.
5. Bapak Tri Agus Susanto, M.S. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama ini.
6. Seluruh Dosen FISIP Unsri yang banyak membantu selama masa perkuliahan di Kampus FISIP UNSRI. Terima kasih untuk mata kuliah pelajaran-pelajarannya selama ini.
7. Bapak Armansyah Edi Utama, S. Sos, selaku Kasubag Pendidikan FISIP Unsri dan seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang selama ini telah banyak membantu dalam urusan administrasi.

KATA PENGANTAR

Skripsi yang berjudul "Potensi Konflik Politik Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 Di Kabupaten Ogan Ilir" secara spesifik mengkaji faktor-faktor yang merupakan potensi konflik pemilu legislatif 2009 di Kabupaten Ogan Ilir.

Tak dapat dipungkiri bahwa selesainya naskah skripsi ini tentunya tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak yang telah memberikan sumbangsih baik moril maupun materil kepada penulis, untuk itu penulis memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT beserta rasul-Nya atas semua limpahan dan curahan nikmat serta kasih sayang, kekuatan, dan perlindungan kepada penulis, dan untuk itu pula secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Dra. Dyah Hapsari, ENH, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasihat, saran dan pengarahan serta pandangan-pandangan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak DR. Zulfikri Suleman, MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosiologi FISIP Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Diana Dewi Sartika S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan saran yang sangat bermanfaat.
5. Bapak Tri Agus Susanto, M.S. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama ini.
6. Seluruh Dosen FISIP Unsri yang banyak membantu selama masa perkuliahan di Kampus FISIP UNSRI. Terima kasih untuk mata kuliah pelajaran-pelajarannya selama ini.
7. Bapak Armansyah Edi Utama, S. Sos, selaku Kasubag Pendidikan FISIP Unsri dan seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang selama ini telah banyak membantu dalam urusan administrasi.

8. Kepada orang tua tercinta dan Ngeh ku tersayang terima kasih atas dorongan, nasihat, motivasi dan bantuan baik moril maupun materil dengan kasih sayang dan do'a yang tiada hentinya yang tentunya sangat berarti dan menjadi kekutaan bagiku. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang dan kebahagiaan pada kalian. Amiiin.
9. Dorie Pratama, Terimakasih atas waktunya, sudah hampir 4 tahun kita lewati, buat motivasinya serta kesabaran, dan pelajaran moril yang diberikan.
10. Fera Hasmita dan Nopia, terimakasih sahabat....buat dorongan dan kebersamaan kita selama ini, lanjutkan perjuangan kalian biar bisa cepet sidang.
11. Semua teman-teman angkatan 2005.
12. Buat Yaya, Ismi, Jusmini, Amel dan Trie, terimakasih atas pengertiannya.
13. Buat Anggota KPU beserta pegawai-pegawainya dan informan lainnya terimakasih atas waktu dan informasi yang diberikan terkait dengan penelitian ini.
14. Buat teman-teman ISBA (Ikatan Mahasiswa Bangka).

Akhirnya penulis berharap apa yang telah dicapai ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Sosiologi. Penulis menyadari banyak keterbatasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis menyambut baik atas berbagai masukan dan saran sebagai perbaikan terhadap skripsi ini.

Inderalaya, Januari 2010

Penulis
Sri Juniarti
07053102041

Potensi Konflik Politik Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 Di Kabupaten Ogan Ilir

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Potensi Konflik Politik Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 Di Kabupaten Ogan Ilir". Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang merupakan potensi konflik politik pada pemilu legislatif 2009 di Kabupaten Ogan Ilir.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang merupakan potensi konflik politik pada pemilu legislatif tahun 2009. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai wacana praktis dari ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan konsep potensi konflik politik agar dapat dikembangkan dalam upaya menambah wawasan keilmuan sosiologi, khususnya sosiologi politik dan pengetahuan tentang potensi konflik. Manfaat praktisnya diharapkan dapat berguna bagi masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif berdasarkan teori konflik. Unit analisis yaitu individu. Penentuan informan dilakukan secara purposive. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi konflik politik pada pemilu legislatif 2009 adalah carut marutnya DPT yang menyebabkan terjadinya kekisruhan DPT, banyaknya partai dan caleg sehingga persaingan antar partai politik dan persaingan antar caleg internal partai politik sangat gencar dan tidak sportif, pelanggaran yang dilakukan eksekusi massa kampanye, ketidakjelasan alur informasi pemilu dan kerawanan pada saat pengumuman hasil pemilu.

Kata kunci: Potensi Konflik dan Pemilu Legislatif

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PESETUJUAN	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR BAGAN	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	10
1.4 Tinjauan Pustaka.....	11
1.5 Metode Penelitian	23
1.5.1 Sifat dan Jenis Penelitian	23
1.5.2 Lokasi Penelitian	23
1.5.3 Data dan Sumber Data.....	24
a. Data Primer	24
b. Data Sekunder.....	25
1.5.4 Informan	25
1.5.5 Unit Analisis	26
1.5.6 Teknik Pengumpulan Data.....	26
1.5.7 Teknik Analisis Data	27
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN.....	29
2.1 Sistem Demokrasi dan Sistem Pemilu Legislatif.....	29
2.2 Pendekatan Sosiologi dalam Konflik.....	33
2.3 Sebab-sebab Timbulnya Konflik.....	35
2.4 Teori Penyebab Konflik.....	36
BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	40
3.1 Deskripsi Daerah Penelitian	40
3.1.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah.....	40
3.1.2 Pemerintahan.....	40



3.1.3 Kependudukan dan Angkatan Kerja.....	41
3.1.4 Penduduk.....	42
3.1.5 Pola Kehidupan Masyarakat	43
3.2 Peserta Pemilu Di Kabupaten Ogan Ilir	45
3.3 Peserta Pemilih Pemilu Legislatif Di Kabupaten Ogan Ilir	48
3.4 Deskripsi Keadaan Informan	55
BAB IV POTENSI KONFLIK POLITIK PEMILU LEGISLATIF	58
4.1 Tanggapan KPU dan Masyarakat Mengenai Pemilu Legislatif 2009.....	58
4.2 Potensi Konflik Politik pada Pemilu Legislatif 2009.....	63
4.2.1 Kekisruhan Daftar Pemilih Tetap	69
4.2.2 Persaingan antar Partai Poloitik	74
4.2.3 Persaingan Caleg dalam Internal Partai Politik.....	79
4.2.4 Ekses Masa Kampanye	84
4.2.5 Kerawanan pada Saat Pengumuman Hasil Pemilu.....	89
4.2.6 Ketidakjelasan Alur Informasi	91
BAB V PENUTUP	95
5.1 Kesimpulan.....	95
5.2 Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio dalam Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007	43
Tabel 3.2 Rekapitulasi Jumlah Daftar Peserta Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Umum Legislatif 2009.....	48
Tabel 3.3 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Umum Legislatif 2009.....	54
Tabel 3.4 Karakteristik Informan Utama (Anggota KPU) Kabupaten Ogan Ilir.....	57
Tabel 3.5 Karakteristik Informan Pendukung (Masyarakat Kabupaten Ogan Ilir.....	57

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran.....	39
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak bergulirnya demonstrasi mahasiswa yang mengatur kejatuhan rezim Pemerintahan Presiden Soeharto hingga sekarang ini, “reformasi” menjadi kata yang paling banyak diucapkan dan ditulis orang. Kata ini yang sebenarnya mempunyai makna dasar saja, lalu seperti menyimpan problematik yang begitu rumit dan seolah mengandung energi yang maha besar untuk mengubah nasib bangsa ini menjadi lebih baik.

Jatuhnya rezim Soeharto pada bulan Mei tahun 1998, menyebabkan terjadinya perubahan lebih lanjut yang dikehendaki yaitu menyangkut proses demokratisasi, atau perubahan-perubahan menuju demokrasi. Dalam atmosfer reformasi itu, keberhasilan Indonesia memasuki kehidupan yang bercorak demokratis agaknya ditentukan oleh sinergi antara perubahan-perubahan struktur kekuasaan serta aturan main kekuatan politik dan perubahan-perubahan pada kekuatan masyarakat atau oleh perpaduan antara perubahan pada tataran struktur politik formal dalam kerangka demokrasi dan perubahan pada gerak hidup elemen-elemen dalam masyarakat sebagai wahana penyemaian kultur demokrasi (Maruto dan Anwari, 2002 : vii-viii).

Gejala menarik dalam perkembangan demokrasi adalah mengenai banyaknya partai-partai politik yang bermanfaat bagi transisi demokratik. Disini partai-partai dianggap sebagai institusi penting bagi penyaluran aspirasi

masyarakat. Pertumbuhan partai-partai adalah sebagai perwujudan pluralitas sosial kultural dan gejala sebagai euforia politik bahkan hanya merupakan instrumen kalangan elite politik memperjuangkan kepentingan pribadi. Maka penting mempersoalkan eksistensi dan peran yang sedang dan seharusnya dimainkan oleh partai-partai politik (Maruto dan Anwari, 2002 : x).

Dalam perspektif sosiologi politik, partai politik merupakan kumpulan dari sekelompok orang dalam masyarakat yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan suatu Pemerintahan atau Negara. Dalam ilmu politik, istilah partai politik bisa disebut sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Secara umum tujuan terbentuknya partai politik adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Suryadi, 2007:221).

Partai politik merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya dalam berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat dalam menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menjadi motivasi bagi masyarakat dalam membentuk partai politik. Keberagaman pendapat dimasyarakat memunculkan berbagai macam partai politik. Disamping itu partai politik sebagai wadah pendidikan politik, komunikasi politik, dan sosialisasi politik masyarakat menuju proses kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Partai-partai politik peserta ajang pesta demokrasi adalah perwujudan partisipasi aktif rakyat melalui penggunaan

hak suaranya untuk memilih wakil rakyat yang diaplikasikan dengan adanya pelaksanaan pemilu.

Pemilu merupakan arena (kompetisi) untuk memperoleh kekuasaan (jabatan public) yang sangaja dibuat justru untuk menghindari persaingan perebutan kekuasaan secara liar dan brutal. Pemilu yang diselenggarakan secara periodik, berulang-ulang dan dengan tata aturan yang jelas merupakan cara untuk membentuk pelembagaan persaingan untuk memperoleh kekuasaan secara damai. Tujuan pemilu adalah pertama, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. Kedua, pemilu sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat. Ketiga, pemilu merupakan sarana memobilisasikan dan menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik (Surbakti, 1992: 181-182).

Dalam penyelenggaraan pemilu dibentuk suatu komisi independen dinamakan KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang beranggotakan orang yang jujur, berdedikasi tinggi, dan tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik manapun. Disamping itu dibentuk pula Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga rakyat benar-benar menikmati penyelenggaraan pesta demokrasi itu. Akan tetapi walaupun sudah terbentuk KPU dan Panwaslu untuk mengawasi jalannya pemilu namun masih adanya kekurangan-kekurangan dan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga pesta demokrasi tersebut tak luput dari adanya potensi konflik atau bahkan terjadinya konflik.

Potensi konflik adalah prakondisi yang memicu munculnya situasi konflik disuatu saat, jika terjadi ketimpangan sosial, pergeseran dan benturan akibat perebutan sumber daya ekonomi, sosial dan politik antar pihak-pihak yang berkepentingan. Kondisi yang dibayangkan adalah keadaan yang buruk, ada kekerasan, pertentangan, korban dan sebagainya. Konflik merupakan gejala umum dalam masyarakat atau istilah lain dikenal dengan "*everyday to life*", artinya seperti tidak ada individu manapun atau masyarakat tanpa konflik. Konflik sudah menjadi bagian hidup manusia. Konflik didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan didasari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan. Istilah konflik dalam ilmu politik acapkali dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Sedangkan menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia konflik politik adalah percekocokan, pertentangan, perselisihan dan ketegangan (Syaifudin, 1986:7).

Semakin banyak kepentingan yang bermain dalam sebuah pemilu akan semakin besar potensi konflik yang muncul. Hal itu paling tidak terbukti dalam pemilu 2004 kemarin. Pemantauan LP3ES misalnya, menemukan bahwa tingkat intimidasi untuk pemilu legislatif relatif lebih besar (7,6%) dibandingkan dengan pilpres I (2,9%) dan pilpres II (1,7%). Banyaknya kandidat yang maju dalam pemilu legislatif membuat jaring kepentingan juga lebih lebar sehingga potensi konflik yang muncul dalam pemilu legislatif lebih besar dibanding pemilu presiden ([www.yipd.or.id/berita agenda.com](http://www.yipd.or.id/berita_agenda.com) diakses tanggal 11 Juli 2009).

Pemilihan Umum anggota Legislatif diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009, menjelang penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut kekhawatiran masyarakat dan pengamat politik menyangkut (1) Kinerja Komisi Pemilihan Umum; (2) Persaingan eksternal dan internal peserta pemilu; (3) Keterlibatan pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu; dan (4) Partisipasi masyarakat. Dalam kategori masyarakat terdapat juga faktor lembaga-lembaga masyarakat sipil, media massa dan kalangan lain yang memiliki perhatian, baik di dalam maupun di luar negeri. Persiapan penyelenggaraan pemilu 2009 tidak lebih mudah atau lebih rumit dari penyelenggaraan pemilu 2004. Masing-masing pemilu memiliki tantangan sendiri-sendiri. Tetapi kalau diperhatikan, kekhawatiran terbesar pelaksanaan pemilu 2009 terletak pada: (Piliang, 2008: 1).

Pertama, lembaga penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Badan Pengawas Pemilu. Tekanan terhadap lembaga penyelenggara pemilu ini begitu kuat, baik dari peserta pemilu, pemerintah, parlemen termasuk dari masyarakat luas. Kapasitas internal yang dimiliki KPU dipertanyakan, sehubungan dengan penilaian atas kinerja yang dilakukan sejak terbentuk. KPU bukan saja terlalu fokus kepada angka-angka spekulatif menyangkut pembiayaan pemilu, tetapi juga terjebak dalam sengketa pilkada yang memicu kerenggangan hubungan dengan pemerintah. Sementara KPU juga mengalami masalah sehubungan dengan ketidak-pastian dalam soal anggaran peraturan pelaksanaan pemilu yang belum selesai.

Kedua, lembaga sekretariat KPU. Lembaga ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Para pejabat yang mengisi terdiri dari pegawai negeri

sipil. Di samping belum begitu jelas pola pengorganisasian lembaga ini, UU No. 22/2006 tentang Penyelenggaraan Pemilu juga menggaris-bawahi tentang wewenang pengambilalihan tahapan penyelenggaraan pemilu, apabila KPU dianggap gagal menyelenggarakannya. Transparansi lembaga sekretariat KPU ini dibutuhkan, terutama dalam pengaturan soal logistik pemilu yang sedikit sekali melibatkan anggota KPU. Trauma atas korupsi yang terjadi pada KPU periode sebelumnya masih membekas, sehingga kepercayaan atas sekretariat KPU dan KPU menjadi penting.

Ketiga, semakin minimnya partisipasi pemilih dalam pilkada. Keprihatinan dilayangkan, terutama atas berbagai indeks ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi yang merupakan produk pemilu dan pilkada. Parlemen dan partai politik makin kehilangan dukungan. Akibatnya, pemilu 2009 diambang ancaman partisipasi rendah. Bagi negara-negara moderen, angka partisipasi yang rendah tidak memunculkan masalah serius, mengingat lembaga-lembaga demokrasinya berjalan dengan baik. Sementara bagi Indonesia yang baru melakukan transisi menuju konsolidasi demokrasi, tentu menjadi persoalan besar.

Keempat, kualitas dari aktor-aktor demokrasi yang akan bersaing. Pemilu 2009 merupakan pemilu peralihan, yakni terjadinya regenerasi dibidang politik, ditengah masih kuatnya para elite lama untuk terus maju dalam pemilu. Persaingan-persaingan politik yang terjadi seolah-olah berada dalam pilihan *to be or not to be*. Para aktor lama diperkirakan akan menjadikan pemilu 2009 sebagai

“pengabdian politik terakhir”, karena pemilu 2014 merupakan titik puncak dari perubahan komposisi elite Indonesia.

KPU sebagai lembaga pertama yang dibentuk hasil reformasi masih mencari bentuk yang tepat. Jika pada waktu penyelenggaraan Pemilu 2004 anggota KPU diseleksi dengan pertimbangan berasal dari elemen-elemen Akademisi, LSM, Pers, Ormas, dan Tokoh masyarakat melalui seleksi, namun menyongsong penyelenggaraan pemilu 2009 pertimbangan tersebut tidak transparan. Begitu juga dengan perangkat lainnya. Di lain pihak ada suatu keprihatinan, kurangnya terlibat tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan yang proporsional dalam sistem ini baik sebagai penyeleksi maupun peserta calon anggota, sehingga syarat profesional sebagai anggota KPU menjadi kabur. Beban kerja KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2009 sangat berat. Berbeda dengan Pemilu 2004 beban berat KPU terletak pada pembuatan aturan-aturan yang beberapa bagian tidak jelas diatur oleh Undang-undang Pemilu baik legislatif maupun Presiden/Wakil Presiden (UU No. 12 Tahun 2003 dan UU No. 23 Tahun 2003) atau aturan yang tidak sepadan dengan situasi di masyarakat, seperti coblos tembus. Pada penyelenggaraan pemilu 2009 ini masalah di lapangan lebih mendominasi. Dipilihnya Kepala Daerah juga secara langsung dan perubahan persyaratan calon anggota DPD serta perubahan jadwal pemilu yang lebih panjang, maka beban penyelenggaraan menjadi bertumpuk pada saat yang sama, hal ini menjadi topik utama kesiapan penyelenggaraan pemilu 2009.

Pelaksanaan pemilu legislatif sangat rawan dan rentan terjadinya konflik. Potensi konflik bisa terjadi antar partai, antar sesama caleg dalam satu partai,

maupun antar pendukung partai. Pertama, perubahan sistem pemberian hak suara dari coblos menjadi conteng atau contreng juga bisa memicu terjadinya konflik. Apalagi sampai sekarang kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPUD belum maksimal. Itu tidak hanya terjadi di pelosok desa yang sulit dijangkau, tapi juga sebagian besar masyarakat yang tinggal di kota. Kedua, begitu banyak caleg dan partai yang menjadi peserta pemilu. Kebingungan warga bisa menjadi salah satu penyebab Pemilu 2009 rawan. Ada beberapa potensi kerawanan yang bisa terjadi, yakni potensi surat suara tidak sah menjadi tinggi. Itu bisa menimbulkan persepsi berbeda di tempat pemungutan suara (TPS) nantinya. Suara tidak sah bakal membengkak mengingat sistem baru tidak diiringi sosialisasi optimal. Potensi kerawanan lain adalah distribusi logistik. Jika distribusi terlambat, rawan penyimpanan. Ketiga, banyaknya warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih dan terdaftar sebagai pemilih ganda ataupun fiktif tetap yang bisa dimanfaatkan sejumlah orang untuk melakukan protes. Apalagi jika warga yang tidak terdaftar tersebut masuk dalam basis massa salah satu partai. Kemudian keempat terkait pelaksanaan kampanye, khususnya pelaksanaan kampanye akbar. Selain gesekan antar parpol, gesekan antar internal parpol juga bisa terjadi.

Potensi konflik terbesar yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir adalah Banyaknya calon Legislatif yang mendaftar semakin memperketat proses persaingan, di Kabupaten Ogan Ilir yang terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) untuk pemilihan anggota Legislatif adalah sebanyak 543 calon yang berasal dari beragam partai, dan kursi yang diperebutkan hanya 40 kursi. Begitu ketat sekali persaingan diantara mereka sehingga kemungkinan untuk melakukan

hal-hal apapun demi memenangkan perolehan suara sangat memicu adanya potensi konflik dan bahkan terjadinya konflik.

Di Kabupaten Ogan Ilir tepatnya di Kecamatan Inderalaya terdapat Universitas negeri yang terbesar di Provinsi Sumatera Selatan yakni Universitas Sriwijaya. Keberadaan Universitas Sriwijaya menyebabkan banyaknya mahasiswa rantau yang selama pendidikannya mengekost atau menetap sementara di Inderalaya. Mobilitas kependudukan yang tidak disertai adanya laporan ke Kelurahan mengakibatkan sulitnya pendataan karena mahasiswa sering berpindah-pindah kos sehingga banyaknya mahasiswa rantau Universitas Sriwijaya di Kabupaten Ogan Ilir yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan berujung terjadinya aksi protes dan demo oleh Mahasiswa Universitas Sriwijaya di depan kantor KPU setempat satu minggu setelah proses pemungutan suara berlangsung, hal tersebut dapat memicu terjadinya potensi konflik.

Keadaan penduduk di Kabupaten Ogan Ilir yang heterogen yang berasal dari suku yang berbeda menyebabkan adanya perbedaan watak dan karakter yang bisa memicu perpecahan diantara mereka dan bisa menjadi potensi konflik. Selain itu banyaknya kertas suara yang akan dicontreng menyebabkan proses pemungutan suara berlangsung rumit dan berbeda dari pemilu biasanya sehingga membutuhkan waktu ekstra yang cukup menguras waktu dan tenaga yang mengakibatkan pecahnya konsentrasi dalam proses pemungutan dan perhitungan suara yang berdampak timbulnya kesalahan-kesalahan dalam proses perhitungan suara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, potensi konflik politik pada saat pemilu legislatif tahun 2009 sangat rawan menyebabkan terjadinya konflik. Untuk mengetahui hal tersebut, maka dirumuskan pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Faktor-faktor apa yang merupakan potensi konflik politik pada pemilu legislatif 2009 di Kabupaten Ogan Ilir?

1.3 Tujuan Dan Manfaat

1.3.a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui potensi konflik politik dan konflik politik pada saat pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten Ogan Ilir.

1.3.b. Tujuan khusus

Untuk mengetahui faktor-faktor yang merupakan potensi konflik politik pada pemilu legislatif 2009 di Kabupaten Ogan Ilir.

1.3.c. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai wacana praktis bagi ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan konsep potensi konflik pada pemilu legislatif agar kemudian dapat dikembangkan dalam upaya menambah wawasan keilmuan sosiologi, khususnya sosiologi politik.

1.3.d. Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada pembaca agar mampu mengidentifikasi potensi konflik politik pada pemilu legislatif.

1.4 Tinjauan Pustaka

Potensi konflik politik adalah prakondisi yang memicu munculnya situasi konflik disuatu saat, jika terjadi ketimpangan sosial, pergeseran dan benturan akibat perebutan kedudukan sosial dan politik antar pihak-pihak yang berkepentingan yang merupakan gejala pertentangan dalam masyarakat yang berkenaan dengan mata rantai kekuasaan dan negara (A.A. Said Gatara dan Moh. Dzulkiah Said:2007).

Menurut Talcott Parsons, Konflik terjadi karena benturan-benturan kepentingan (perebutan Status, Kekuasaan, dan materi) dari para aktor yang ada. Konflik selalu hadir dan melekat pada kehidupan sosial, oleh karena itu, konflik perlu dimaknai secara bijak. Permasalahannya adalah, kita hanya mampu melihat konflik pada saat terjadi atau setelah terjadi benturan, sehingga sering kali kita menyimpulkan konflik sebagai sesuatu yang negatif dan perlu dihindarkan dengan menghilangkan perbedaan. Padahal konflik tersebut bisa berlaku positif, jika kita mampu melihat dan mengambil langkah tepat. Karena dengan adanya konflik, tentu saja ada perbedaan, maka kita dapat melakukan perbaikan, inovasi, kemajuan serta alternatif-alternatif solusi dari sumber yang beraneka ragam tersebut. Konflik berdampak positif sepanjang, konflik tersebut masih berupa perbedaan gagasan-gagasan untuk memajukan/mencapai tujuan (<http://users2.titanichost.com>. Diakses tanggal 23 juni 2009).

Menurut tipologinya, konflik dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Vertikal

Adalah konflik yang terjadi antara negara disatu sisi melawan masyarakat (civil society) disisi lain. Contoh di Indonesia adalah konflik antara Pusat dan Daerah.

b. Horisontal

Konflik horisontal adalah konflik yang terjadi antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Contohnya adalah adanya kerusuhan sosial, separatisme, serta perebutan SDA.

Sedangkan menurut Sifatnya, konflik terdiri dari 2 jenis

a. Tertutup / Laten

b. Terbuka

Konflik dilihat dari akarnya dapat dibagi menjadi 2 tipe yaitu :

a. Penyebabnya yaitu sesuatu yang potensial dan aktual dapat menyebabkan konflik

b. Pemicu yaitu sesuatu yang bisa memantik atau menjadi triger terjadinya suatu konflik

Dalam mengenal konflik dari akarnya ini dikenal sebuah teori yang menjelaskan hubungan pemantik, serta perantara dan akar konflik, yaitu dikenal sebagai Teori Lilin. Teori lilin menjelaskan 3 faktor yang harus ada dan terkait satu sama lain dalam suatu konflik yaitu:

1. Pemantik (trigering Factor) adalah pihak-pihak yang menyalakan api
2. isu-isu, aktor-aktor, ketegangan-ketegangan struktural dalam masyarakat

3. Minyak adalah akar dari konflik. Misalnya SARA.

Indonesia memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam menyelenggarakan pemilu. Pengalaman pemilu-pemilu tersebut, diatur oleh berbagai produk perundang-undangan yang dari waktu ke waktu dan dari satu periode ke periode lainnya, terus-menerus mengalami perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi, tentu saja ada yang bersifat stagnan, progres dan bahkan ada yang mengalami kemunduran.

Sistem pemilihan umum 2009 dibentuk atas dasar Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. UU Pemilu atau sistem dan proses Pemilu ditetapkan bukan semata-mata untuk pemilu itu sendiri, melainkan untuk membentuk suatu perwakilan politik. Menetapkan suatu UU Pemilu dapat berarti juga melakukan rekayasa tentang perwakilan politik yang ingin dibentuk. Perwakilan politik yang *fair* mencerminkan keberagaman aspirasi dan kepentingan yang berkembang di masyarakat. Menetapkan sistem pemilu melalui proses pembentukan undang-undang bukan berarti suatu proses yang bebas nilai atau kepentingan, yang terjadi malah sebaliknya, yakni proses itu sarat dengan kepentingan politik yang beragam. Pembuat undang-undang adalah mereka yang terlibat langsung dengan pemilu. Kenyataan ini tidak dapat mengingkari aktor-aktor pembentuk undang-undang itu menetapkan peraturan yang dapat mengakomodasi kepentingan mereka. Ini dapat ditelisik dengan melihat beberapa ketentuan dalam undang-undang pemilu 2009 yang diduga kuat merupakan hasil kompromi, atau lebih

tepatnya “tukar-menukar” kepentingan di antara para aktor pembentuk undang-undang tersebut (TA. Legowo, 2007:1).

Pemilu merupakan arena persaingan (kompetisi) untuk memperoleh kekuasaan (jabatan publik) yang sengaja dibuat justru untuk menghindari persaingan perebutan kekuasaan secara liar dan brutal. Pemilu yang diselenggarakan secara periodik, berulang-ulang dan dengan tata-aturan yang jelas merupakan cara untuk bentuk pelembagaan persaingan untuk memperoleh kekuasaan secara damai. Akan tetapi pelaksanaan pemilu tak luput dari adanya potensi konflik yang sewaktu-waktu bisa memicu terjadinya konflik politik. Potensi konflik politik adalah prakondisi yang memicu munculnya situasi konflik disuatu saat, jika terjadi ketimpangan sosial, pergeseran dan benturan akibat perebutan kedudukan sosial dan politik antar pihak-pihak yang berkepentingan. Kondisi yang dibayangkan adalah keadaan yang buruk, ada kekerasan, pertentangan, korban dan sebagainya.

Pemilihan Umum disebut juga dengan “*political Market*” (Dr. Indria Samego). Artinya bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antar peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih serta terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti, spanduk, pamflet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk *face to face* (tatap muka) atau lobby yang berisi penyampaian mengenai

program, platform, asas, ideologi serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif (A. Rahman H. I, 2007: 147).

Sistem pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme terpenting untuk membentuk kompetisi politik, karena ia adalah, mengutip Giovanni Sartori, “instrumen politik yang dapat dibentuk yang paling spesifik” artinya, ia dapat direncanakan sedemikian untuk mencapai tujuan tertentu. Ia dapat memberikan ganjaran bagi tipe tindakan-tindakan tertentu dan mengekang tindakan-tindakan lainnya. Sistem pemilihan umum dirancang untuk melakukan tiga tugas utama. Pertama, berperan sebagai saluran tempat rakyat bisa meminta pertanggungjawaban wakil-wakilnya. Kedua, menerjemahkan pilihan yang diberikan rakyat menjadi kursi yang dimenangkan dalam lembaga legislatif. Ketiga, sistem pemilihan umum yang lain membentuk batas-batas diskursus politik yang bisa diterima dalam cara-cara yang berbeda, dan memberikan insentif bagi mereka yang berkompetisi untuk mengiklankan dirinya kepada pemilih dengan cara-cara tertentu (Reilly dan Harris, 2000: 193-194).

Dalam perkembangannya badan legislatif dilakukan pemilihan melalui mekanisme pemilihan umum sehingga dapat diterima keberadaanya secara sah dan menyeluruh di seluruh sebagai badan yang mewakili rakyat dan memiliki wewenang untuk menentukan kebijaksanaan umum dalam membuat undang-undang. Dengan berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat, maka dewan perwakilan rakyat menjadi badan yang berhak

meyelenggarakan kedaulatan itu dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum dan menuangkannya dalam undang-undang.

Dewan Perwakilan Rakyat di negara demokratis disusun sedemikian rupa sehingga ia mewakili mayoritas dari rakyat dan pemerintah bertanggung jawab kepadanya. Untuk menjamin perumusan C.F Strong: “Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu” (Rahman H.I, 2007: 124).

Menurut Mirriam Budiarjo, sistem penentuan anggota DPR beraneka ragam sifatnya, yaitu: Turun temurun, ditunjuk, dan dipilih; baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sistem penentuan atau pemilihan badan legislatif yang berlaku di Indonesia saat ini adalah sistem penentuan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum legislatif. Perwakilan ini bersifat politik berdasarkan sistem kepartaian, akan tetapi tidak menutup kemungkinan beberapa orang anggota dipilih tanpa ikatan pada sesuatu partai, tetapi sebagai orang “independent” seperti pada pemilihan umum di Indonesia pada tahun 1955 dan pemilihan umum tahun 2009. Pemilu legislatif yang diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009 dilaksanakan untuk memilih anggota DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Menurut Miriam Budiarjo: Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan

merebut kedudukan politik melalui cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan yang mereka miliki. Menurut R.H. Sultau: Partai politik adalah sekelompok warga yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. Sigmund Neumann mengatakan bahwa partai politik adalah dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan-golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah kumpulan orang yang memiliki nilai dan cita-cita yang sama, terorganisir, dan memiliki tujuan yang sama untuk meraih kekuasaan politik dalam pemerintahan negara.

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini yakni: penelitian yang dilakukan oleh Humas Mahasiswa Universitas Indonesia yang berjudul Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu (Studi pada KPU tahun 1999) (<http://one.indoskripsi.com>. Diakses tanggal 11 Mei 2009). Secara umum berusaha menggambarkan dan menganalisis konteks perubahan politik Indonesia, khususnya pemilu yang diselenggarakan tahun 1999. Secara khusus penelitian ini menganalisis hubungan-hubungan dinamika dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 1999, yang menyangkut unsur-unsur negara dengan aktor-aktor dan struktur-struktur politik lain dalam penyelenggaraan pemilu di era transisi. Penelitian mencakup empat isu utama yang tercermin dalam tujuan penelitian,

yakni: (1) Pemilu 1999 dalam konteks transisi politik Indonesia; (2) kelembagaan penyelenggara Pemilu di Indonesia, khususnya KPU pada Pemilu 1999; (3) bekerjanya unsur-unsur negara dalam struktur kelembagaan dan kinerja KPU Pemilu 1999; dan (4) peranan politik KPU 1999 dalam meletakkan landasan yang kokoh bagi pembaharuan (reformasi) kelembagaan politik di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendasarkan pada paradigma konstruktivisme. Sedangkan landasan teoritiknya menggunakan teori dialektika agensi-struktur dalam Teori strukturasi Anthony Giddens. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah mengkombinasikan metode wawancara mendalam, studi dokumentasi dan observasi.

Penelitian ini berhasil mengajukan dua kesimpulan utama, yaitu kesimpulan praktik politik dan teoretik. Kesimpulan praktik secara umum menggambarkan bahwa perubahan politik (menuju demokrasi) selalu menghasilkan polarisasi kekuatan-kekuatan politik, baik di tingkat negara maupun di akar rumput (*grass roots*). Pada konteks yang lebih lanjut, perubahan ini tentu saja menyulut terjadinya ketegangan, konflik, dan tarik menarik kepentingan antara aktor-aktor politik yang bermain. Pada lingkup yang lebih mikro di KPU, polarisasi politik tidak saja bersumber dari latar belakang ideologi, kultur dan sikap politik masa lalu aktor-aktor tersebut. Oleh karena di era transisi politik ini terjadi ketidakpastian mengenai apa yang akan terbentuk dan terlembagakan, maka polarisasi kekuatan politik juga bersumber dari usaha-usaha memperebutkan peluang sekaligus mengukuhkan pengaruhnya pada konstruksi politik yang akan terbentuk nantinya. Cara yang ditempuh antara lain terlibat dalam mempengaruhi

pembuatan dan implementasi segala perangkat aturan. Karena, peraturan-peraturan yang akan muncul akan sangat menentukan sumber-sumber mana yang secara sah boleh dikerahkan ke arena individual dan politik, serta pelaku-pelaku mana yang diperkenankan masuk dan terlibat.

Apa yang terjadi di KPU adalah cerminan bagaimana masing-masing aktor itu menggunakan legitimasi dan kebebasan yang dimilikinya untuk memainkan peranan politik tersebut. Akibatnya, aturan yang di satu sisi memberikan dasar legitimasi bagi keberadaan dan kinerja KPU, tetapi pada sisi yang lain telah menyumbang berbagai kontroversi dan kontradiksi politik. Pada saat negara menjadi bagian yang ikut bermain dalam pertarungan tersebut yang lebih paralel dengan arus utama (*mainstream*) politik publik justru gagal meyakinkan sebagian besar politisi di KPU untuk mengambil sikap dan tindakan politik yang sejalan. Sebabnya, negara tidak sepenuhnya mampu mengontrol dinamika politik yang ada dengan sumber-sumber alokatif maupun kekuatan otoritatif dan kapasitas organisasionalnya di satu sisi, sementara itu di pihak negara pun kekuatannya terfragmentasi, tidak utuh. Sementara pada saat yang sama, para aktor di KPU justru dengan bebasnya memainkan dan menginterpretasikan kepentingannya.

Kesimpulan teoretik dalam penelitian ini dapat menggambarkan temuan-temuan teoretik yang pada dasarnya konfirmasi atau penguatan terhadap "kebenaran" teori tersebut. Namun demikian, modifikasi atas beroperasinya teori ini juga nampak. Tidak adanya dominasi baik antara agen-agen politik yang bertarung, maupun struktur-struktur politik yang tersedia dan diproduksi di KPU selama penyelenggaraan Pemilu 1999 membuktikan bahwa Giddens dalam hal ini

benar: determinasi terhadap proses sosial (politik), bukan terletak pada salah satunya, tetapi keduanya saling mengandalkan, sehingga kekuasaan atau *power* yang dapat terbentuk, diraih atau dikuasai juga terbukti pada sejauhmana para pelaku (*actor*) politik itu menguasai dan memproduksi struktur-struktur (baik legitimasi, dominatif, maupun signifikansi) yang ada.

Hasil penelitian lainnya yang dapat melengkapi penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sam Ugyo Ibnu Redjo dalam Tesis UI nya berjudul "Perkembangan Politik Indonesia: Fungsionalisasi Partai-Partai Politik Pasca Azas Tunggal Tahun 1985" (<http://mendra-ok-blog.freindster.com>. Diakses tanggal 1 Mei 2009). Dimana kesimpulan penelitian Studi ini berangkat dari tesis peneliti yang melihat pembangunan politik berlangsung apabila fungsionalisasi partai politik mengarah kepada eguitas dan adanya tata tertib Pemilu. Untuk menguji tesis pokok masalah yang diangkat oleh peneliti adalah apakah dengan azas tunggal, parpol dapat berfungsi dan proses pemungutan suara lebih baik dan tertib. Studi ini memperlihatkan bahwa pembangunan politik di Indonesia khususnya fungsi partai politik dalam pemilu terdapat persoalan pada aspek kesamaan fungsinya yang kemudian berpengaruh terhadap kesanggupan sistem politik dan demokrasi. Pola penataan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap partai politik ternyata tidak hanya berakibat pada berkurangnya fungsi partai, tetapi juga mendorong munculnya konflik internal partai. Lebih dari itu tingkat ketergantungan anggota terhadap pemerintah dan partai menyebabkan rendahnya dinamika dan partisipasi politik, tidak adanya kompetisi yang ketat, serta struktur politik yang cenderung *bapakisme*.

Hasil penelitian lainnya yang relevan untuk melengkapi penelitian ini adalah tentang “Pelaksanaan Pilkada Langsung di Indonesia” dari penelitian litbang JPPR (<http://www.opensubscider.com>. Diakses tanggal 11 Mei 2009). Penelitian ini mengungkapkan penyebab utama konflik massa dalam Pilkada adalah soal rekapitulasi suara, daftar pemilih, verifikasi calon dan kecurangan-kecurangan Pilkada yang tidak ditindaklanjuti. Kekurangan inilah yang harus diperbaiki agar pelaksanaan Pilkada kedepannya bisa memperkuat konsolidasi demokrasi dan bukan justru memperlemah proses konsolidasi tersebut. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan Pilkada maka paling tidak ada 3 hal yang bisa kita lakukan, yakni melakukan amandemen yang komprehensif terhadap aturan-aturan Pilkada sehingga permasalahan seperti sistem pendaftaran pemilih yang selama ini selalu bermasalah bisa ditanggulangi; kedua, merekrut para penyelenggara Pilkada dari tingkat KPU Provinsi sampai KPPS yang berkualitas dan imparisial sehingga kecurangan dalam proses rekapitulasi dan juga verifikasi calon bisa dihindari; ketiga, melaksanakan pendidikan politik yang masif bukan hanya kepada masyarakat umum tetapi juga kepada para elit politik agar mereka bisa lebih dewasa dalam berpolitik dan menghindari praktek politik yang menghalalkan segala cara.

Hasil penelitian lainnya yang relevan dengan penelitian saya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dedi Irawan untuk tesisnya yang berjudul “Dampak Gerakan Reformasi terhadap Konflik Politik Internal Golkar (Periode 21 Mei 1998- 20 Oktober 1999), Yang dilakukan pada tahun 2001. Tesis ini ingin menjelaskan pengaruh perubahan gerakan reformasi terhadap Golkar yang terlihat

banyak konflik politik di internal partai politik tersebut. Konflik politik di Golkar pasca jatuhnya Soeharto menunjukkan adanya keinginan dari organisasi tersebut untuk berubah. Namun perubahan tersebut tidak berjalan mulus bahkan terjadi konflik karena adanya kelompok-kelompok yang tidak menyukai perubahan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh reformasi terhadap konflik di tubuh Golkar. Tekanan gerakan reformasi menjadikan salah satu yang menyebabkan Harmoko selaku ketua partai mengeluarkan pernyataan bahwa agar Soeharto mengundurkan diri dari kursi presiden. Digunakannya isu-isu yang sesuai dengan semangat reformasi menjadi indikasi adanya pengaruh gerakan reformasi tersebut. Konflik politik di Golkar menunjukkan bahwa organisasi itu sangat rentan dengan perubahan. Konflik terjadi karena adanya pihak yang tidak siap terhadap perubahan. Namun konflik politik yang terjadi adalah ekses yang harus ditempuh Golkar manakala ia ingin berubah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konflik politik di Golkar merupakan salah satu hasil dari tuntutan terjadinya perubahan politik (<http://www.unisosdem.org>. Diakses tanggal 06 Juli 2009).

Berbeda dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, penelitian yang akan saya lakukan ini berusaha mengetahui dan mengkaji faktor-faktor apa saja yang merupakan potensi konflik politik pada pemilu legislatif 2009 di Kabupaten Ogan Ilir dan juga ingin menjelaskan bagaimana munculnya potensi konflik politik tersebut dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang dideskripsikan berdasarkan hasil wawancara dengan informan, observasi dan dari data-data yang diperoleh di lapangan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Sifat Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong: 2005). Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mana penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ini ditekankan pada pemberian gambaran objek tentang keadaan yang sebenarnya dari subjek yang diteliti. Penelitian ini menggambarkan potensi konflik politik pada pemilu legislatif 2009 di Kabupaten Ogan Ilir.

1.5.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Ogan Ilir. Alasannya adalah Kabupaten Ogan Ilir merupakan Kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang No. 37 Tahun 2003 dan diresmikan pada tanggal 07 Januari 2004. Kabupaten yang baru belum memiliki pengalaman yang cukup dalam penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di lapangan ditemukan bahwa banyaknya mahasiswa rantau Universitas Sriwijaya di Kabupaten Ogan Ilir yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap sehingga mengakibatkan terjadinya aksi protes dan demo oleh Mahasiswa Universitas Sriwijaya di depan kantor KPU setempat satu minggu setelah proses pemungutan suara, hal tersebut dapat memicu terjadinya potensi konflik. Selain itu pada saat proses pemungutan suara berlangsung, KPPS

setempat sangat mengeluhkan mengenai rumitnya perhitungan suara yang berbeda dari pemilu biasanya sehingga membutuhkan waktu ekstra yang cukup menguras waktu dan tenaga akibatnya konsentrasi mereka jadi menurun yang berdampak timbulnya kesalahan-kesalahan dalam proses perhitungan suara. Selain itu calon legislatif yang terdaftar di Kabupaten ini sebanyak 543 calon, sedangkan kursi yang tersedia hanya 40 kursi, persaingan yang begitu ketat dapat memicu munculnya potensi konflik dan bahkan terjadinya konflik.

1.5.3. Data dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland, sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah *kata-kata* dan *tindakan*, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2005:157). Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya (Joko P, 2006: 87). Data primer yang dimaksud dalam penelitian, merupakan sejumlah data yang menjadi dasar pertanyaan, serta berkaitan langsung dengan informan yang mengikuti seluruh kegiatan pemilihan umum yaitu, anggota Komisi Pemilihan Umum dan tokoh masyarakat. Penggalan data ditentukan langsung oleh informan baik dilakukan di rumah maupun ditempat lainnya. Pengkondisian penggalan data dilakukan mengingat organisasi sosial politik ini yang menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum anggota legislatif.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen, arsip, maupun sejumlah buku referensi baik milik organisasi maupun dari luar organisasi. Data organisasi meliputi jumlah kader partai, struktur, referensi kegiatan maupun hasil kegiatan, buku panduan dan lain sebagainya. Data dari luar organisasi seperti kedudukan, pekerjaan, pendidikan dan lain sebagainya.

1.5.4. Informan

Informan penelitian ini adalah anggota Komisi Pemilihan Umum Ogan Ilir yang berjumlah empat orang yang merupakan informan kunci dalam memberikan informasi mengenai potensi konflik pemilu dan perkembangan dalam proses pelaksanaan pemilu legislatif di Kabupaten Ogan Ilir, Informan ini memberikan informasi seputar pelaksanaan pemilu dan proses pengawasan pemilu. Informan pendukung adalah tokoh masyarakat, yang berjumlah enam orang yang terdiri dari 3 orang dari kader partai yang merupakan caleg, 1 orang dari perwakilan mahasiswa, 2 orang lainnya adalah tokoh masyarakat yang ikut serta dalam kepanitiaan pelaksanaan pemilu di Kelurahan masing-masing. Informan ini akan memberikan informasi dan tanggapan mengenai pelaksanaan pemilu umum perspektif mereka.

1.5.5. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yaitu anggota Komisi Pemilihan Umum dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam pemilu legislatif 2009.

I.5.6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dalam penelitian ini adalah berupa pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti yang disusun dalam pedoman wawancara dengan tujuan agar memudahkan peneliti dalam proses penggalian informasi. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada informan bersifat langsung, secara mendalam dan intensif. Teknik ini digunakan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan sejumlah data yang menyangkut latar belakang dari adanya potensi konflik pemilu dan konflik yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemilu. Proses wawancara ini dilakukan diberbagai tempat. Selama proses wawancara berlangsung peneliti hanya menggunakan pokok-pokok garis besar pertanyaan.

b. Observasi

Teknik ini digunakan oleh peneliti sebagai salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui keadaan atau situasi Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas mereka sebagai pengawas pemilu. Selama proses observasi berlangsung peneliti tetap menggunakan identitas diri sebagai peneliti, dan melibatkan salah satu informan yang berpengaruh dalam memberikan sejumlah informasi yang diperlukan.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini peneliti membaca dan mempelajari hal-hal yang bersangkutan dengan penelitian melalui koran, majalah, dan dokumentasi lainnya,

seperti: arsip-arsip KPU, Kader Partai, data-data pemilu dan data-data yang diperoleh dari internet.

1.5.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992). Melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Bungin Burhan, 2001: 229).

a. Tahap Reduksi Data

Pada penelitian ini akan memusatkan perhatian pada data yang ada di lapangan yang telah terlebih dahulu terkumpul, data lapangan tersebut selanjutnya dipilih dalam arti kata menentukan derajat relevansinya dengan maksud penelitian, data yang cocok dengan penelitian yang akan peneliti ambil. Proses awal dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah tersedia dari berbagai sumber yaitu, wawancara, dan observasi. Peneliti memusatkan pada data lapangan yaitu mengenai potensi konflik politik pemilu legislatif yang kemudian melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Selanjutnya mereduksi data, yaitu menyeleksi data yang ada di lapangan sesuai dengan masalah yang diteliti pada tahap ini data yang terkumpul dalam catatan-catatan di lapangan dirangkum dan diseleksi.

b. Tahap Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks naratif terlebih dahulu. Artinya, data-data yang telah direduksi akan peneliti sajikan dalam bentuk cerita.

c. Tahap Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti akan melakukan uji kebenaran disetiap makna yang muncul dari data yang sudah ada. Artinya, seluruh data yang telah diproses pada tahap reduksi data dan penyajian data di atas secara umum dapat ditarik kesimpulan guna untuk mendapatkan intisari dan hasil dari seluruh proses penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwari dan Maruto, 2002. *Reformasi Politik Dan Kekuatan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Azhari, dan Syafiie, Kencana, 2006. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Budiarjo, Mirriam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia.
- Bungin, Burhan, 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Cangara, Hafied, 2009. *Komunikasi Politik Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Dan, Nimmo, 2005. *Komunikasi Politik Komunikator, Pesan Dan Media*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Gatara, Said dan Said Dzulkiah, 2007. *Sosiologi Politik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Harris, Peter dan Reilly Ben, 2000. *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*, diterjemahkan oleh LP4M. Jakarta: International IDEA.
- Hendricks, William, 2004. *Bagaimana Mengelola Konflik*, diterjemahkan oleh Arif Santoso. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Juanda, 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*. Bandung: PT. Alumni Bandung.
- Kelsen Helen, 1973. *General Theory Of Law and State*. New York: Russe&Russel.
- Kusnardi, Muhammad dan Ibrahim, Harmaily, 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI
- Liliweri, Alo, 1997. *Sosilogi Organisasi*. Bandung: PT. Citra aditya Bakti.
- Mayo, Henry B, 1960. *An Introduction To Demokratis Theory*. New York: Oxford University Press.
- Moleong. Lexy J, 2005. *Metode Penelitan Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazsir, Nasrullah, 2008. *Teori-Teori Sosiologi*. Bandung: Widya Padjadjaran.

- Raga, Maran, R. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Rahman, A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sahdan, Gregorius, 2008. Seminar; Implikasi UU NO. 10/2008 Tentang Pemilu Terhadap Penyelenggaraan Pemilu 2009, *UU Pemilu NO. 10/2008 Dan Penyelenggaraan Pemilu 2009*, Palembang.
- Saptiawan, Ardiyan, 2008. Seminar; Implikasi UU No. 10/2008 Tentang Pemilu Terhadap Penyelenggaraan Pemilu 2009, *Kesiapan KPU Dalam Menyelenggarakan Pemilu 2009*, Palembang.
- Subagya, Joko P, 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryadi, Budi, 2007. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Supriyanto, Didik dan Santoso, Topo, 2004. *Mengawasi Pemilu Mengawali Demokrasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Surbakti, Ramlan, 1992. *Memahami Ilmu politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Soekonto, Soerjono, 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tutik, Triwulan, Titik, 2005. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Pakpahan, Muchtar, 2006. *Ilmu Negara Dan Politik*. Jakarta: PT Bumi Intitama Sejahtera.
- Piliang, J, Indra, 2008. Seminar; Implikasi UU No. 10./2008 Tentang Pemilu Terhadap Penyelenggaraan Pemilu 2009, *KPU, Pemilu 2009 Dan Kualitas Demokrasi Tantangan Dalam Pendidikan Pemilih*, Palembang.

Sumber lainnya

- [Http://mendra-ok-.blog.friendster.com](http://mendra-ok-.blog.friendster.com). 2007. *Partai Politik dan Representasi Politik Publik*. Diakses Tanggal 11 Mei 2009.
- [Http://one.indoskripsi.com](http://one.indoskripsi.com). 2008. *Partai Politik Di Indonesia*. Diakses Tanggal 11 Mei 2009.
- [Http://www.opensubscider.com](http://www.opensubscider.com). 2007. *Pelaksanaan Pilkada Langsung*. Diakses Tanggal 11 mei 2009.

[Http://User2.titanic.com](http://User2.titanic.com). 2007. Supriyanto, Juni. *Peta Potensi Konflik Di Indonesia*. Diakses Tanggal 23 Juni 2009.

[Http://www.unisosdem.org](http://www.unisosdem.org). 2007. *Gerakan Reformasi*. Diakses Tanggal 06 juli 2009.

[Http://www.yipd.or.id/berita agenda.com](http://www.yipd.or.id/berita_agenda.com). 2005. Takta Prapti Ujyati, Peneliti LP3ES. *Mengapa Perlu Judicial Review UU Pilkada*. Diakses tanggal 11 Juli 2009.

[Http://dunia politikku. Blogspot.com](http://dunia.politikku.blogspot.com). 2009. Wibiono. *Konflik Politik Dalam Pemilu Legislatif*. Diakses tanggal 25 oktober 2009.

Arsip KPU Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009.

Arsip Badan Pusat Statistik Tahun 2007.